

Perempuan & Pandemi Covid-19

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan & Pandemi Covid-19

Artikel

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Gadis Arivia

Dari Kehilangan ke ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan Covid-19

Meylani Yo & Pupu Purwaningsih

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Alimatul Qibtiyah

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivistis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Robertus Robet, Retna Hanani & Charine

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

Misiyah

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Andi Nur Faizah

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Atnike Nova Sigi, Abby Gina & Dewi Komalasari

Diterbitkan oleh:

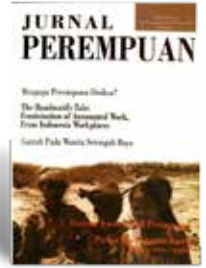


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

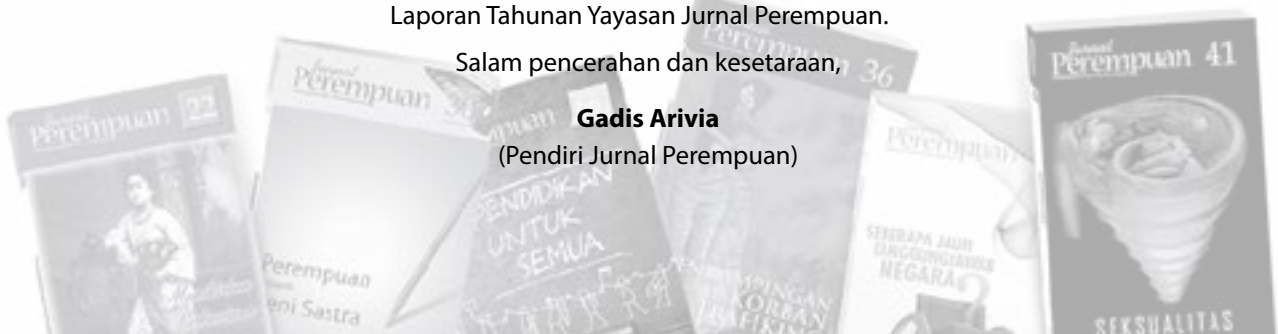
Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi
Abby Gina Boangmanalu
Dewi Komalasari
Octania Wynn
Agnes Diana Wahyuni
Hendrik Bolitobi

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03
Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Pandemi Covid-19/ <i>Woman and Covid-19 Pandemic</i>	iii-iv
Atnike Nova Sigiyo	

Artikel

- Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19/
Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19 221-231
Gadis Arivia
- Dari Kehilangan ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19/
From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation 233-246
Meylani Yo & Pupu Purwaningsih
- Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19/
Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19 247-257
Alimatul Qibtiyah
- Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivist dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19/
Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia 259-269
Robertus Robet, Retna Hanani & Charine
- Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19/
The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation 271-282
Misiyah
- Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas:
Pengalaman Simpul Rahima/
*Female Ulema's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities:
The Experience of 'Simpul Rahima'* 283-294
Andi Nur Faizah
- Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap
Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional/
*Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic
towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism* 295-308
Atnike Nova Sigiyo, Abby Gina & Dewi Komalasari

Perempuan dan Pandemi Covid-19

Woman and Covid-19 Pandemic

Ketimpangan gender di dalam masyarakat dinilai turut memperburuk dampak Pandemi Covid-19 terhadap perempuan. *Rapid Gender Assessment* (RGA) oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia menemukan lebih dari 15 persen perempuan kehilangan pekerjaan, 41 persen perempuan mengalami pengurangan upah, dan menemukan terjadinya peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga, selama pandemi Covid-19. Tak hanya dampak ekonomi dan sosial, pandemi Covid-19 juga menyebabkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Shadow pandemic* adalah konsep yang menjelaskan fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19.

Keluarga sebagai '*gendered institution*' merupakan salah satu fokus penting dalam studi-studi feminisme. Feminisme melihat keluarga di dalam masyarakat yang patriarkis sebagai wujud dari relasi gender yang timpang, di mana peran gender perempuan dikonstruksi dan ditempatkan secara subordinat. Dalam struktur masyarakat yang patriarkis, perempuan dilekatkan dengan peran produksi afektif-seksual (*sex-affective production*), yang bertugas memberikan pengasuhan emosional bagi anak dan laki-laki, serta kepuasan seksual bagi laki-laki. Sementara itu, kerja-kerja di dalam keluarga, seperti kerja pengasuhan (*carework*) atau kerja rumah tangga (*housework*), cenderung dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah, dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan.

Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan status pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemi adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan kebijakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) yang mewajibkan pembatasan kegiatan di ruang publik seperti di kantor, pabrik, tempat hiburan, tempat ibadah, restoran, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Pembatasan jarak sosial ini telah mengakibatkan kontraksi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka pandemi Covid-19 kemudian dibayangi oleh ancaman PHK terhadap pekerja, serta hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai jenis wira usaha dan/ atau sektor informal. Dampak ekonomi dari pandemi tidak hanya terjadi pada ekonomi makro tetapi juga terhadap perekonomian rumah tangga.

Analisis atas relasi gender yang timpang di dalam keluarga penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Penerapan pembatasan jarak sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan di ruang publik harus dilakukan dari rumah. Sehingga di masa pandemi kita melihat munculnya berbagai bentuk kegiatan seperti: bekerja dari rumah (*work from home*), bersekolah jarak jauh, beribadah jarak jauh, termasuk berbelanja daring (*online shopping*). Terpusatnya berbagai kegiatan ke dalam rumah menyebabkan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga semakin besar. Di masa pandemi, misalnya, seorang ibu yang bekerja (*working mother*) harus dapat mengatur beban dan waktu kerja antara bekerja dari rumah dengan mendampingi anak bersekolah daring. Di masa pandemi, seorang ibu rumah tangga juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan biaya listrik yang naik, ketika pendapatan keluarga menurun.

Feminisme interseksional (*intersectional feminism*) merupakan sebuah konsep feminisme yang penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal di masa pandemi Covid-19. Secara umum beban rumah tangga yang membesar di masa pandemi tentu berdampak terhadap perempuan. Namun perempuan bukanlah entitas yang homogen. Di masa pandemi Covid-19, pekerja rumah tangga (PRT) - yang umumnya dilakukan oleh perempuan, merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami eksploitasi. Meski beban kerja PRT di masa pandemi semakin besar, namun pada umumnya PRT tidak mendapatkan tambahan upah. Sebaliknya, selama pandemi PRT justru menjadi rentan terhadap PHK dan stigma sebagai penyebar virus Corona. PRT migran menghadapi kerentanan yang relatif sama dengan PRT di dalam negeri, selain juga rentan untuk dipulangkan kembali ke dalam negeri.

Feminisme interseksional juga dapat mengungkapkan marginalisasi berlapis yang dialami oleh kelompok marginal, seperti LGBT atau transgender. Karena identitas gendernya, kaum transgender memiliki akses terbatas untuk memperoleh pekerjaan di berbagai bidang. Selama penerapan PSBB, jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum transgender, seperti salon kecantikan, pengamen, restoran, merupakan jenis pekerjaan yang banyak ditutup atau dibatasi. Di beberapa kasus, kaum transgender juga menghadapi hambatan akses terhadap

bantuan sosial karena tidak memiliki kartu penduduk. Sementara itu, akibat identitas gendernya, keluarga yang pada umumnya menjadi tumpuan perlindungan di masa pandemi, justru menjadi tempat yang rentan terjadi kekerasan terhadap kelompok transgender. Relasi sosial, ekonomi, dan politik yang timpang, membawa dampak pandemi yang lebih buruk terhadap kelompok yang mengalami ketimpangan berlapis. Kerentanan berlapis inilah yang dialami misalnya oleh kelompok transgender, perempuan dengan disabilitas, pekerja rumah tangga (PRT), perempuan nelayan, pekerja migran, dan lainnya, di masa pandemi Covid-19.

Meski berada dalam posisi subordinat, perempuan tetap memiliki agensi untuk bertahan di masa pandemi, bahkan untuk memberikan dukungan bagi komunitasnya. Perempuan Sumba, misalnya, mengembangkan inisiatif edukasi, pemberian informasi, dan komunikasi mengenai Covid-19, bagi komunitasnya. Agensi perempuan lainnya juga dapat dilihat dari kerelawanan yang dilakukan oleh Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). SPJ berhasil mentransformasi pandangan yang bias terhadap kerja perawatan, seperti memasak di dapur, menjadi gerakan solidaritas dapur umum bagi komunitas marginal di masa pandemi Covid-19.

Dalam ruang sosial yang terbatas di masa pandemi Covid-19, perempuan mampu mendorong aksi kolektif, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga menciptakan ruang bagi kepentingan publik. Pengalaman organisasi perempuan seperti Rahima dan 'Aisyiyah, memperlihatkan gerak kolektif perempuan untuk mendampingi komunitas melalui gerakan solidaritas bantuan dan pendidikan. Sementara itu, KAPAL Perempuan berusaha mengembangkan inisiatif solidaritas sambil tetap memerhatikan kekerasan berbasis gender yang tetap terjadi di masa pandemi,

seperti perkawinan anak. Selain mengatasi tekanan '*gendered space*' yang diakibatkan oleh pandemi, kaum perempuan juga mempertahankan politik kewargaan di ruang publik. Maka, meskipun ruang publik di masa pandemi Covid-19 semakin menyempit, namun para aktivis perempuan tetap turut mengawal politik kewargaan, seperti mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, mendorong pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta terlibat dalam gerakan untuk mengkritik terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jurnal Perempuan edisi ke-107 tentang Perempuan dan Pandemi Covid-19 kembali mengkonfirmasi temuan dan pengalaman perempuan di berbagai negara, bahwa di Indonesia pandemi Covid-19 juga membawa beban dan kerentanan lebih terhadap perempuan. Kelindan ketimpangan antara identitas gender, posisi kelas, status sosial, dan pandemi Covid-19, telah menyebabkan kerentanan berlapis terhadap perempuan dan kelompok marginal. Oleh sebab itu, penempatan perempuan secara substantif dalam penanganan pandemi Covid-19 diperlukan tidak hanya karena perempuan merupakan salah satu kelompok yang menghadapi kerentanan besar, tetapi juga karena perempuan merupakan tulang punggung dari proses pencegahan dan pemulihan pandemi. Pengalaman agensi kaum perempuan mengajarkan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat diatasi dengan mendomestikasi persoalan-persoalan yang muncul. Di sini kita kembali diingatkan pada satu argumen yang berkembang di masa feminisme gelombang kedua, bahwa pengalaman-pengalaman personal perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur politik yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa "*the personal is political*". Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiyo)**

Gadis Arivia

(Sociology, Anthropology and Criminal Justice Department,
Montgomery College, Takoma Park Campus, MD, USA 20912)

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, 2 hal. 221-231, 2 gambar, 16 daftar pustaka

The author argues for using a new theoretical foundation and criticizes Gender Mainstreaming perspective in issues related to gender. The author proposes an intersectionality approach that can critically see the problem of Covid-19 and its implications to not only gender relations (men and women) but also race, ethnicity, class, LGBTQIA, and other minority groups. The author emphasizes the concept of critical praxis, which uses both critical questions and activism for total social change.

Keywords: Covid-19, Intersectionality, Critical Praxis, Gender Mainstreaming, Male Crisis

Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan COVID-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep *critical praxis*, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Kata kunci: Covid-19, Interseksionalitas, Praksis Kritis, Pengarusutamaan Gender, Maskulinitas

¹Meylani Yo, ²Pupu Purwaningsih

(¹Universitas Multimedia Nusantara & ²Independent Researcher
Jl. Scientia Boulevard, Gading, Kec. Serpong, Tangerang,
Banten 15227)

Dari Kehilangan Ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19

From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 233-246, 37 daftar pustaka

This article describes the capacity of Sumbanese women to survive and adapt to the Covid-19 pandemic. Pandemic response creates problems due to changes in various aspects of life, such as health access patterns, social interaction and relationships, work patterns and employment status, religious practice, and school education system. To overcome the impact of pandemic response, they change their behavior and lifestyle, such as utilizing strategic partners in Covid-19-related education, participating as community volunteers, switching professions, and building social support among fellow community members. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, online focus group discussions, and online surveys.

Keywords: resilience, social relation, stigmatisation, Sumbanese women, Covid-19.

Artikel ini menggambarkan kemampuan kelompok rentan perempuan Sumba dalam bertahan dan beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19. Pengendalian pandemi menimbulkan masalah karena adanya berbagai perubahan seperti yang terjadi pada pola akses pelayanan kesehatan, cara berinteraksi dan berelasi sosial, pola kerja dan status hubungan kerja, penghayatan iman, serta sistem pendidikan sekolah. Untuk mengatasi dampak pengendalian pandemi mereka mengubah perilaku dan pola hidup seperti memanfaatkan mitra strategis dalam sosialisasi covid-19, berpartisipasi sebagai relawan sosialisasi, beralih profesi, dan membangun dukungan sosial antar sesama anggota komunitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus secara daring, serta survei daring.

Kata kunci: ketahanan, relasi sosial, stigmatisasi, perempuan Sumba, Covid-19.

Alimatul Qibtiyah

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta; Komnas Perempuan; Jl. Laksda Adisucipto No. 1
Yogyakarta, Indonesia; Jl. Laturharhari 48B Menteng,
Jakarta Pusat, 10310 Indonesia)

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 247-257, 2 tabel, 32 daftar pustaka

The Covid-19 pandemic has brought serious impact due to its massive scale, that occur all over the world, at all levels of groups within society. This disaster has a strong social dimension because its vulnerabilities often intersects with the existing social stratification. In various disasters, women often become one of the most vulnerable to be affected, especially in the context of culture of patriarchy, that intertwine with misogynistic interpretations of religion, and the unfriendly economic and political system towards women. This article aim to identify the forms of the impacts Covid-19 pandemic on women, overnment's regulations that deal with these impacts, as well as women's efforts both as individual and in groups in dealing those impacts. This research was conducted through literature study over various researches by several institutions, also through observation and interviews with several women groups. The results of this study found that women are one of the most vulnerable and the most affected groups of Covid-19 Pandemic. Although rather delayed, government has included women in the decision-making in handling the situation of women, children and vulnerable groups during the pandemic. Women's experiences both as individual and groups in responding to the impact of pandemic also deserve some appreciation. This research found that during the pandemic, women have shown their resilience, creativity, and put forward women's collaboration.

Keywords: women and pandemic, Covid-19 pandemic, women resilience

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat serius karena bersifat masif, terjadi di seluruh dunia, pada semua level di berbagai kelompok di dalam masyarakat. Bencana ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena kerentanan yang muncul kerap beririsan dengan stratifikasi sosial yang ada. Dalam berbagai bencana, perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak, terutama dalam konteks budaya patriarki yang berkelindan dengan penafsiran agama yang misoginis, serta sistem ekonomi dan politik yang tidak

ramah pada perempuan. Tulisan ini berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan, peraturan negara yang dibuat untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, serta upaya-upaya kaum perempuan baik secara individu ataupun kelompok dalam menghadapi pandemi. Riset ini dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dari berbagai hasil riset beberapa lembaga, serta observasi dan wawancara pada beberapa kelompok perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan paling terdampak oleh Pandemi Covid-19. Walaupun agak terlambat, pemerintah telah melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan perempuan, anak dan kelompok rentan di masa pandemi. Pengalaman perempuan baik secara individu dan maupun kelompok dalam merespons dampak pandemi juga patut mendapatkan apresiasi. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memiliki kelentingan dalam menghadapi pandemi, kreatif, serta mengedepankan kolaborasi di antara perempuan.

Kata Kunci: perempuan dan pandemi, pandemi Covid-19, kelentingan perempuan

¹Robertus Robet, ²Retna Hanani, ³Charine

(¹Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, ²Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro, ³Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta; ^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur; ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang)

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivistis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 259-269, 1 tabel, 27 daftar pustaka

The Covid19 pandemic has changed society's spatial practices substantially. Large-scale social restrictions, lockdowns, and the obligation to wear masks have changed the way humans relates to each other personally and politically. This article discusses how the pandemic has shaped civic space of women activists and how women activists maintain and create citizenship space amid the pandemic and democratic regression. The data source of the article is collected through online survey of 20 female activists and in-depth online interviews. The results show that civil society organizations in Indonesia are under immense pressure due to pandemic and democratic regression. For civil society organizations, their space is limited by various legal regulations and various violence and stigma aimed at civil society activists. More than that, for women activists the pandemic also provides additional domestic burdens which make the space for women activists increasingly limited. In the midst of these obstacles, our research shows that women and civil society activists do not reduce their intensity in maintaining the civic space.

Key words: pandemic, civic space, spatial politics, democracy.

Pandemi telah mengubah praktik spasial masyarakat secara substansial. Pembatasan sosial berskala besar, *lockdown*, dan kewajiban memakai masker telah mengubah cara manusia membangun relasi intim maupun relasi kewargaan dan demokrasi. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandemi mengubah ruang kewargaan (*civic space*) perempuan aktivis dan bagaimana mereka mempertahankan dan menciptakan ruang kewargaan ditengah pandemi dan regresi demokrasi. Sumber data artikel adalah survei elektronik 20 perempuan aktivis dan wawancara mendalam melalui medium daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) di Indonesia mengalami tekanan yang semakin berat.

Bagi organisasi masyarakat sipil, ruang gerak mereka dibatasi oleh berbagai peraturan hukum dan pelbagai kekerasan dan stigma yang ditujukan kepada aktivis *civil society*. Lebih dari itu, bagi perempuan aktivis, pandemi juga memberikan beban tambahan domestik yang membuat ruang gerak perempuan aktivis semakin terbatas. Di tengah hambatan-hambatan tersebut, penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan aktivis dan *civil society* tidak mengurangi intensitas mereka dalam mempertahankan ruang kewargaan.

Kata kunci: pandemi, ruang kewargaan, politik spasial, demokrasi

Misiyah

(Institut KAPAL Perempuan Jl. Kalibata Timur Raya, No. 5 Jakarta Selatan 12740, Indonesia)

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 271-282, 18 daftar pustaka

This paper looks at the urgency of gender perspective in Covid-19 pandemic's mitigation in Indonesia. This is crucial given the lack of gender perspective in measures to handle the pandemic in Indonesia and therefore deepening the existing gender inequality. This situation can be seen in the mitigation of the pandemic's impacts, particularly the specific impact of the pandemic on women within the gender cross-sectoral issues (economy, health, and education), and women's participation in the decision-making processes. Data during the pandemic show that the pandemic has caused serious impacts on women. Therefore, data and gender analysis are needed in order to ensure that measures in handling the pandemic would address the problems that are faced by women and vulnerable groups. This paper will present data from global and national, as well as data from KAPAL Perempuan's field experiences in its collaboration with its local partner organizations in 6 (six) provinces. The paper also draws from documentation from the experiences of other organizations in integrating gender perspective from the past natural disasters' mitigations that ever occurred in Yogyakarta, West Sumatra, Palu, and Lombok.

Keywords: gender and pandemic, women's leadership, pandemic and violence against women, grassroots women

Tulisan ini membahas urgensi perspektif gender dalam mitigasi pandemi di Indonesia. Ini penting dilakukan karena perspektif gender dalam penanganan pandemi di Indonesia masih minim dan mengakibatkan ketimpangan gender makin menajam. Hal ini dapat dirasakan pada penanganan dampak pandemi yang spesifik dialami perempuan pada isu-isu gender lintas sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan), serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Data-data selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi mempunyai dampak serius terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, data dan analisis gender dibutuhkan agar penanganan pandemi dapat menjawab masalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tulisan ini akan mengungkap data global, nasional dan pengalaman lapangan dari Institut KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal yang selama ini bekerja sama secara intensif di 6 (enam) provinsi. Tulisan ini juga merujuk pada dokumentasi pengalaman beberapa pihak dalam mengintegrasikan perspektif gender untuk mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta, Sumatera Barat, Palu, dan Lombok.

Kata kunci: gender dan pandemi, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak perempuan, pandemi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akar rumput.

Andi Nur Faizah

(Rahima-Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan, Jl. H. Shibi No. 70, RT. 007/01, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan)

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Women Ulama's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities: The Experience of 'Simpul Rahima'

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 283-294, 1 tabel, 1 gambar, 1 gambar, 19 daftar pustaka

This article raises the experience of female ulama's autonomy and strength in responding to the Covid-19 pandemic in their communities. The female ulama that is represented by Simpul Rahima in this article, refers to the female ulemas who have attended series of Female Ulama School, that are based in community, with gender equality perspective about Islam. Data collection is conducted through focused group discussion (FGD) and online observation. This study reveals that self-autonomy of the female ulama has distinct characteristic from those of male ulama. The female ulama's preach is based on women's real experience. Female ulama also utilize their authority politically to disseminate a peaceful, full of compassion and just Islamic teaching amidst religious interpretation which often marginalizes the position of women. In related with strength, female ulama utilize majelis taklim to preach a gender-just Islam as well as organize women's collective strength.

Keywords: female ulama, Covid-19 pandemic, women's autonomy

Tulisan ini mengangkat pengalaman otonomi dan kekuatan perempuan ulama dalam merespons pandemi Covid-19 di komunitas mereka. Perempuan ulama atau yang disebut dengan Simpul Rahima di dalam tulisan ini merujuk pada ulama dengan jenis kelamin perempuan yang telah mengikuti rangkaian Pendidikan Ulama Perempuan, memiliki basis di komunitas, serta memiliki perspektif Islam yang adil gender. Pengambilan data dilakukan melalui *focused group discussion* (FGD) dan pengamatan secara daring (*online*). Penelitian ini menemukan bahwa otonomi diri Simpul Rahima memiliki kekhasan yang berbeda dengan laki-laki ulama. Perempuan ulama mendakwahkan agama berbasis pengalaman riil perempuan. Perempuan ulama juga secara politis memanfaatkan otoritas yang dimiliki untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai, penuh kasih sayang, dan berkeadilan bagi perempuan di tengah penafsiran agama yang kerap meminggirkan posisi perempuan. Terkait kekuatan, perempuan ulama menggunakan majelis taklim untuk mengajarkan Islam yang adil gender sekaligus mengorganisasi kekuatan kolektif perempuan.

Kata kunci: perempuan ulama, pandemi Covid-19, otonomi perempuan

¹Atnike Nova Sigi, ²Abby Gina, ³Dewi Komalasari
(^{1,2,3} Jurnal Perempuan & ¹ Universitas Paramadina ^{1,2,3} Jl. Tanah Manisan 72, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; ¹ Jl. Gatot Subroto No. Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan)

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 295-308, 1 tabel, 37 daftar pustaka

Social distancing has been used as one of the methods to prevent the spreading of Corona virus during the Covid-19 pandemic. This method has been applied in many countries. In Indonesia, the social distancing method is implemented based on the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), a large-scale social distancing policy. Through PSBB policy, a large number of activities in public domain must be closed and/or be restricted. Meanwhile, many of societal activities, such as schooling and working, must be held through long distance or being conducted at home. The application of social distancing has caused increasing of women's responsibilities on care work and house work in domestic domain. Through intersectional feminism's perspective, this article tries to elaborate the impact of the application of social distancing towards women and marginalized groups. This article found that the existing inequalities namely gender inequality, class inequality, and other forms of social inequality that have been experienced by women and the marginalized groups, have worsened their situations during the application of social distancing policy in Indonesia during the Covid-19 pandemic.

Key words: Covid-19 pandemic, intersectional feminism, social distancing, care work

Pembatasan jarak sosial (*social distancing*) adalah salah satu bentuk metode pencegahan penyebaran virus Corona di masa pandemi Covid-19. Metode ini dijalankan oleh berbagai negara. Di Indonesia, metode pembatasan jarak sosial ini dijalankan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan rumah tangga, dan hal ini memperbesar tanggung jawab perempuan dalam kerja-kerja perawatan (*carework*) dan kerja rumah tangga (*housework*) di ranah domestik. Melalui perspektif feminisme interseksional, artikel ini mencoba memaparkan dampak penerapan pembatasan jarak sosial di Indonesia terhadap perempuan dan kelompok marginal. Artikel ini menemukan bahwa berbagai ketimpangan seperti ketimpangan gender, ketimpangan kelas, dan ketimpangan sosial yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal di dalam tulisan ini telah memperburuk situasi mereka di saat penerapan pembatasan jarak sosial dilakukan di Indonesia.

Kata kunci: pandemi Covid-19; feminisme interseksional; pembatasan jarak sosial; kerja perawatan

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19

Gadis Arivia

Sociology, Anthropology and Criminal Justice Department,
Montgomery College, Takoma Park Campus, MD, USA 20912

Gadis.Effendi@montgomerycollege.edu

Kronologi Naskah: diterima 14 Oktober 2020, direvisi 22 Oktober 2020, diputuskan diterima 6 November 2020

Abstract:

The author argues for using a new theoretical foundation and criticizes Gender Mainstreaming perspective in issues related to gender. The author proposes an intersectionality approach that can critically see the problem of Covid-19 and its implications to not only gender relations (men and women) but also race, ethnicity, class, LGBTQIA, and other minority groups. The author emphasizes the concept of critical praxis, which uses both critical questions and activism for total social change.

Keywords: Covid-19, Intersectionality, Critical Praxis, Gender Mainstreaming, Male Crisis

Abstrak:

Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan Covid-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep *critical praxis*, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Kata kunci: Covid-19, Interseksionalitas, Praksis Kritis, Pengarusutamaan Gender, Krisis Maskulinitas

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 bermula dari kota Wuhan, China, terdeteksi pada bulan Desember 2019. Pada pertengahan bulan Januari 2020, virus corona dengan cepat menjalar ke seluruh dunia dan dalam waktu singkat jutaan orang terinfeksi serta hampir satu juta orang meninggal dunia secara global. Di kebanyakan negara, aturan *lockdown* dan *social distancing* diterapkan guna menghentikan penyebaran virus. Covid-19 bukan saja mengakibatkan krisis kesehatan melainkan juga krisis ekonomi dan sosial.

Pandemi Covid-19 tidak berdampak sama pada semua orang atau kelompok. Pandemi memiliki pengaruh yang lebih besar pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak perempuan. Studi pengaruh epidemi di masa lalu seperti Ebola dan Sars, memberikan gambaran yang utuh bagaimana perempuan dan anak perempuan lebih termarginalkan bukan saja dalam akses kesehatan dan ekonomi, tetapi juga mengalami kekerasan berbasis gender. Oleh sebab itu, telah banyak organisasi dunia memberikan perhatian pada masalah efek pandemi dan epidemi pada perempuan dan anak

perempuan (WHO 2007). Namun meskipun diskursus yang diajukan oleh para badan dunia telah memerhatikan aspek gender, analisis mereka tidak mendalam dan tidak membongkar persoalan diskriminasi, penindasan dan marginalisasi yang berkelindan dengan ras, etnisitas, kemiskinan, maskulinitas dalam kepemimpinan, *transphobia*, dan sebagainya.

Analisis yang sering digunakan oleh para badan dan pemerintahan dunia adalah Pengarusutamaan Gender, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Di sinilah menurut saya letak masalahnya, mengapa setiap ada krisis, diagnosis sosial-gender selalu meleset? Sebab menurut saya ada krisis teori yang tidak memadai dengan demikian tidak mampu untuk melihat persoalan secara jernih, dan tidak mampu menerjemahkan persoalan gender dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis feminisme.

Menurut saya, analisis Pengarusutamaan Gender sudah saatnya ditinggalkan. Saya memilih pijakan feminisme, sebab hanya dengan lensa feminisme, kita dapat melihat dengan kritis adanya persoalan

ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan serta kelompok marginal lainnya. Tulisan ini hendak memberikan landasan teoritis yang menjelaskan persoalan Covid-19 dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas. Pendekatan ini melihat dengan kritis adanya persoalan ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang berkelindan dengan persoalan lainnya seperti ras, etnisitas, kelas dan maskulinitas kebijakan negara. Teori interseksionalitas menggunakan pendekatan feminisme praksis. Artinya, membangun pemahaman yang liyan dan memahaminya dengan menggarisbawahi isu kekuasaan, otoritas, etika, dan refleksi dalam penelitian sosial.

Pembahasan Gender dalam Situasi Krisis

Di setiap situasi krisis, kelompok yang paling rentan adalah kelompok marginal seperti perempuan dan anak perempuan. Sebab dalam keadaan krisis, ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan selalu hadir. Misalnya, LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

Apik mencatat 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan dan kekerasan seksual dari tanggal 16 Maret hingga 30 Maret. 17 kasus dari 59 kasus tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (Oktavianti 2020). Di negara lain seperti India, juga melaporkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dalam minggu pertama *lockdown*, dan sama halnya dengan negara Prancis yang mengalami peningkatan sepertiga dalam minggu pertama *lockdown*. Hal ini tidak mengejutkan karena belajar dari kasus epidemi Ebola di Afrika Barat, Guinea mencatat peningkatan tajam kekerasan terhadap perempuan sebesar 4.5 persen. Peningkatan kekerasan seksual juga terjadi di Liberia. Akses kesehatan reproduksi juga menjadi masalah sebab klinik-klinik pelayanan reproduksi sepi karena takut pada virus Ebola dan ini merugikan perempuan (Caspani 2015).

Beberapa hal yang saya rangkum saat ini yang menjadi masalah di saat pandemi yang memiliki efek bergender (kesenjangan, ketimpangan, dan diskriminasi) seperti dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Dampak Gender Pandemi Terhadap Perempuan

Sumber: diolah oleh penulis

Menurut *de Paz et al.* (2020) dalam catatan Bank Dunia (*the World Bank*), ada lima hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, permasalahan kesehatan terhadap perempuan bukan saja terbatas pada akses kesehatan reproduksi tetapi juga pada kerentanan perempuan yang sebagian besar berperan sebagai pengasuh di dalam keluarga. Artinya, perempuan lebih banyak merawat keluarga yang sakit dan dengan demikian lebih terpapar pada penyakit. Juga perlu

diingat, tatanan dunia kerja kita sebagian besar masih terpilah berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, perawat sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan sekuriti maupun logistik sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini, ketersediaan alat pelindung diri (APD) menjadi penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan APD tersedia bagi rakyat (baca: pekerja perempuan) di saat krisis pandemi.

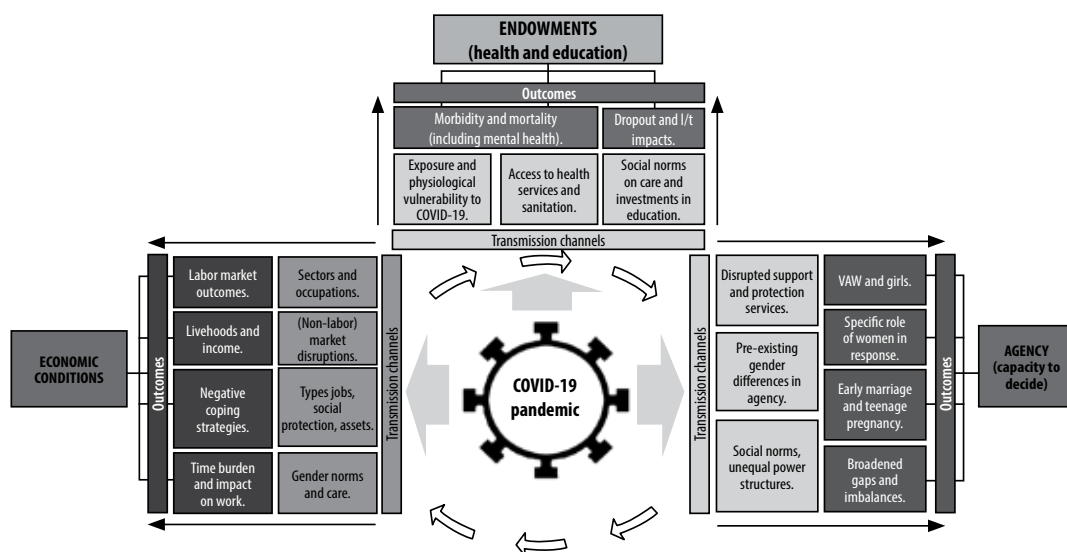
Kedua, norma gender dalam permasalahan pendidikan perlu diperhatikan. Akses internet untuk anak-anak apakah terjangkau bagi anak-anak tergolong miskin? Bagaimana pengaturan kuota internet di rumah mengingat seluruh pengajaran kini dilakukan secara daring. Apakah para ibu rumah tangga memiliki akses yang sama dengan para suami mereka bahkan seharusnya lebih banyak karena tanggung jawab mendidik anak-anak sebagian besar masih merupakan tanggung jawab ibu?.

Ketiga, implikasi gender di dalam kondisi ekonomi. Secara global perempuan akan mengalami beban yang lebih besar karena tanggung jawab yang berganda. Perempuan yang bekerja bukan saja memastikan pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik (sebagaimana laki-laki) tetapi juga memiliki beban untuk memastikan pekerjaan rumah (PR) anak terselesaikan serta memonitor jalannya pendidikan daring anak. Selain tanggung jawab mengawasi anak, tugas merawat anak dan orang tua, semua ini merupakan beban yang lebih

banyak ditanggung perempuan. Pada perempuan yang tergolong sebagai kelompok miskin, pekerjaan informal seperti kerja domestik, usaha kecil, dan usaha rumahan yang banyak diemban oleh perempuan menjadi sangat rentan.

Keempat, kebijakan “cash transfer” yang diterapkan oleh pemerintah untuk kelompok rentan termasuk perempuan merupakan program yang penting di masa pandemi. Pertanyaannya adalah apakah program ini sampai kepada perempuan atau diberikan kepada laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga?

Kelima, yang menarik dari pemaparan kertas kerja *Bank Dunia* ini adalah menggarisbawahi agensi perempuan. Ada dua hal yang diutarakan dalam soal implikasi gender untuk agensi. Kebijakan karantina dapat mengisolasi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi akses untuk mencari pertolongan, serta perlunya mekanisme bantuan informal (jejaring) untuk kesehatan dan termasuk kesehatan mental perempuan.



Gambar 2. Implikasi Covid-19 Menurut Bank Dunia

Sumber: Policy Note the World Bank 2020

Gambar 2 di atas memperlihatkan kerangka yang digunakan *Bank Dunia* menekankan tiga hal di dalam analisisnya, yakni, akses ekonomi (termasuk akses pekerjaan dan aset) yang mencakup pandangan kondisi ekonomi yang lebih luas seperti kesehatan dan pendidikan serta agensi dan suara perempuan (kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri).

Kerangka berpikir yang diutarakan oleh *Bank Dunia* dan beberapa badan dunia besar lainnya merupakan kerangka berpikir yang umum dilakukan dan diikuti oleh

sebagian besar pemerintah (terutama pemerintahan yang memiliki hutang besar pada *Bank Dunia*). Kerangka berpikir ini menurut saya adalah kerangka berpikir yang tidak lepas dari Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan lebih dari dua dekade. Telah banyak penelitian yang menunjukkan kegagalan Pengarusutamaan Gender. Buktinya, di masa pandemi kerangka berpikir seperti ini tidak berhasil menunjukkan relasi kuasa yang kuat berkuat pada budaya patriarki. Hal lain yang menjadi catatan saya, pendekatan Pengarusutamaan Gender tidak mampu melihat kompleksitas persoalan,

atau menggunakan lensa sistem berkelindan. Analisis yang ditampilkan masih berkuat pada persoalan gender sebatas relasi laki-laki dan perempuan dan tidak memasukkan unsur ras, kelas, etnisitas, orientasi seksual dan sebagainya.

Kegagalan Konsep Pengarusutamaan Gender

Teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan gender sering kali berangkat dari analisis Pengarusutamaan Gender yang berpijak pada teori gender dan pembangunan. Kritik dalam menggunakan pendekatan tersebut hanya berfokus pada persoalan gender dan kemudian hanya menggunakan “stempel gender”. Sebagai contoh, pendekatan “stempel gender” adalah bantuan sembako. Bantuan ini merupakan bantuan sesaat dan reaktif, tanpa didasari data yang terkait kerangka pemikiran feminis. Respons pemerintah yang tidak menggunakan data terpilah gender, hasilnya hanya sesaat, dan tidak tepat sasaran serta tidak menghasilkan perubahan yang bermakna. Itu sebabnya, Indonesia setiap kali ada krisis kembali pada “*business as usual*” (bagi-bagi sembako) tanpa mengaitkan adanya sistem penindasan yang perlu dibongkar. Pendekatan Pengarusutamaan Gender pada akhirnya memang hanya sebatas “stempel gender”, yang dalam pandemi Covid-19 terasa tidak memadai.

Asal-usul Pengarusutamaan Gender diadopsi sebagai strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender pada tahun 1995 di acara *Fourth World Conference of Women*. Konsep ini bernafsu untuk mengarusutamakan gender di seluruh area kritis seperti kemiskinan, HAM (Hak Asasi Manusia), ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dan konflik bersenjata. Prinsip Pengarusutamaan Gender kemudian menggunakan bahasa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pada tahun 1997, definisi konkret Pengarusutamaan Gender adalah:

Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality. (Laporan Fourth World Conference on Women, Beijing, 1997).

Pengarusutamaan Gender oleh berbagai institusi dan badan dunia dianggap dapat mengobati ketimpangan gender dengan mujarab. Berbagai

institusi menilai instrumen Pengarusutamaan Gender telah mencapai hasil yang dikehendaki. Misalnya sebanyak 40 organisasi internasional membuat klaim bahwa mereka telah berhasil memajukan kesehatan reproduktif perempuan: menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan pengetahuan kontrasepsi, kemampuan menegosiasi hubungan seksual yang aman, meningkatkan pengetahuan HIV/AIDS, dan sebagainya. *Population Reference Bureau* dan *USAID* (2011) menganggap keberhasilan-keberhasilan tersebut signifikan. Mereka mencatat hasil positif yang juga terlihat di tingkat komunitas dan politik. Organisasi SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) mencatat di tahun 2010 bahkan membuat klaim telah mampu mengangkat persoalan relasi kuasa dengan menyebutkan sejumlah proyek di Etiopia yang didanai SIDA bekerjasama dengan *Amhara Rural Development Program* dan pemerintah Kenya. Meskipun SIDA mengakui bahwa persoalan relasi kuasa hanya mengalami sedikit kemajuan di dalam keluarga, tetapi status ekonomi perempuan membaik. Beberapa proyek yang melibatkan kelompok feminis yang dikerjakan oleh AWID dengan dana sebesar 70 juta pound sterling diklaim berhasil dalam mengangkat ketidaksetaraan dan membangun pergerakan feminis yang solid. Riset yang dilakukan oleh Htun dan Weldon (2012) mencatat bahwa kerjasama dengan kelompok feminis berhasil hanya pada soal kekerasan gender dan macet dalam menggagas kebijakan yang berbasis feminisme. Laporan UNDP (*United Nations Development Programme*) mencatat kerjasama dengan kelompok feminis lebih sukses dalam meningkatkan pergerakan global (Pittman 2014).

Kritik yang paling utama dalam pendekatan Pengarusutamaan Gender adalah dari kalangan feminis yang melihat miskinnya perspektif feminisme dalam diskursus Pengarusutamaan Gender. Para feminis menganggap bahwa pendekatan Pengarusutamaan Gender tidak transformatif dan cenderung birokratis serta teknokratis. Terlebih lagi, diskursus LGBTQIA sering kali dieksklusi dari Pengarusutamaan Gender. Kritik tajam lainnya adalah kecenderungan menggunakan ahli gender yang teknokratis dan terkonsentrasi dari negara maju dan tidak menggunakan diskursus yang bervariasi menurut Mukhopadhyay (2013) di dalam Laporan UNDP (Pittman 2014). Oleh sebab itu, strategi yang digunakan selain birokratis juga menggunakan pendekatan “polisi”, mulai dari pelatihan-pelatihan yang diberikan hingga kultur organisasi yang arogan dalam bekerjasama dengan organisasi lokal. Misalnya, instrumen untuk mengukur organisasi lokal mulai dari soal pelaporan hingga pelaksanaan di lapangan berlebihan dan membebankan,

sebaliknya, instrumen untuk menilai organisasi pendonor tidak ada. Organisasi lokal jarang dimintai penilaian terhadap organisasi pendonor atau memberikan evaluasi terhadap kepemimpinan organisasi tersebut. Strategi mutakhir yang digunakan oleh organisasi internasional adalah menempatkan orang-orang lokal (dengan sering kali mencomot sumberdaya dari organisasi-organisasi lokal) di struktur organisasinya, untuk mengawasi organisasi lokal yang menjalankan program-program kerjasama. Namun strategi ini juga tidak berhasil sebab kultur relasi kuasa tetap terjadi.

Interseksionalitas

Interseksionalitas digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam melihat keadaan secara terang-benderang karena adanya keterbatasan konsep. Misalnya bila data yang ada tidak cocok dengan kerangka pemikiran feminis, sulit untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat dan gagal dalam mengidentifikasi persoalan. Menurut Crenshaw dalam Schnall (2020) bila kita gagal dalam mengidentifikasi persoalan maka kita akan gagal mencari solusi.

Kimberlé Crenshaw adalah feminis yang menetapkan teori interseksionalitas. Ia mengkritik pemahaman ketidaksetaraan dari lensa perbedaan material yang dimiliki, misalnya, hanya semata soal perempuan yang berpenghasilan lebih rendah dari laki-laki, atau kemiskinan perempuan yang diukur hanya dalam terminologi ekonomi. Padahal feminisasi kemiskinan bukan hanya persoalan perempuan miskin (karena berpenghasilan rendah) tetapi juga karena adanya persoalan yang bersimpangan seperti beban membesarkan dan merawat anak, akses kesehatan dan pendidikan yang minim, diskriminasi ras, hukum yang bias, dan sebagainya, yang kesemuanya itu memengaruhi perempuan.

Interseksionalitas pada dasarnya menginvestigasi bagaimana relasi kuasa yang bersimpangan memengaruhi relasi sosial dalam masyarakat yang majemuk dan juga dalam pengalaman keseharian. Sebagai alat analisis, pandangan interseksionalitas melihat kategori ras, etnisitas, kelas, gender, seksualitas, negara, disabilitas, dan umur yang saling berkelindan dan saling membentuk. Interseksionalitas adalah cara memahami dan menjelaskan kompleksitas dunia, masyarakat dan pengalaman manusia (Hill Collins & Bilge 2020).

Pendekatan interseksionalitas dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian maupun sebagai alat

analisis. Misalnya di dalam kehidupan keseharian, alat interseksionalitas dipakai di Amerika Serikat di tahun 1960an dan 1970an dalam melihat ketimpangan dalam soal pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, karena adanya persoalan yang berkelindan antara gender, rasisme dan kelas. Salah satu kritik feminis perempuan kulit hitam di Amerika Serikat adalah mempersoalkan feminis perempuan kulit putih yang tidak melihat dimensi di luar relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan kulit hitam bukan hanya mengalami diskriminasi gender tetapi juga ras dan kelas. Persoalan gender perlu membongkar seluruh sistem yang berkelindan.

Sebagai alat analisis, pendekatan interseksionalitas dapat pula dipakai dalam masyarakat dan negara yang berbeda. Misalnya di India, pendekatan interseksionalitas bukan saja mengangkat masalah ketimpangan gender tetapi juga sistem kasta yang menghasilkan subordinasi perempuan. Di Indonesia juga ada sistem kasta yang merugikan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari analisis gender seperti di dalam masyarakat Bali. Dapat juga diterapkan di dalam masyarakat Papua yang mengalami rasisme. Maka, dalam menganalisis perempuan Papua dan Bali diperlukan teori interseksionalitas yang dapat melihat kompleksitas kehidupan perempuan Papua dan Bali. Interseksionalitas juga berguna untuk melihat persoalan perempuan di dunia Islam yang mengalami marginalisasi, aspek gender yang berkelindan dengan adanya diskriminasi agama karena pilihan-pilihan hidup beragama.

Hal lain yang menarik di dalam pendekatan interseksionalitas adalah meninggalkan konsep kelas yang berkacamata kuda. Pendekatan interseksionalitas tidak melihat persoalan kelas secara tersendiri tetapi melihat adanya isu ketidaksetaraan yang melampaui kelas. Feminis Zillah Eisenstein (2014) dalam Hill Collins & Bilge (2020) mengemukakan bahwa kelas dan kapitalisme secara mendasar adalah interseksional.

When civil rights activists speak about race they are told that they need to think about class as well. When anti-racist feminists focus on the problems of gendered racism they are also told to include class. So...when formulating class inequality, one should have race and gender in view as well. Capital is intersectional. It always intersects with the bodies that produce the labor. Therefore, the accumulation of wealth is embedded in the racialized and engendered structures that enhance it. (Hill Collins & Bilge 2020).

Berbicara soal kapitalisme tidak terpisahkan dari ketidaksetaraan sosial, seksisme dan sistem-sistem kekuasaan lainnya. Tanpa menggunakan kerangka kerja interseksionalitas yang melampaui penjelasan berbasis

kelas tidak akan terungkap persoalan lainnya yang terkait seperti ras, gender, seksualitas, umur, disabilitas, kewarganegaraan, yang semuanya berkelindan dan menghasilkan ketidaksetaraan, marginalisasi dan dominasi.

Di sinilah menurut saya lensa interseksionalitas memberikan gambaran yang utuh dalam mengedepankan ekonomi yang adil dan inklusif. Analisis yang menggunakan pijakan Pengarusutamaan Gender hanya berfokus pada relasi gender dan tidak akan mampu melihat secara menyeluruh persoalan yang dihadapi perempuan, yang berkelindan dengan masalah sosial lainnya. Perempuan mengalami penindasan yang berlapis. Crénshaw memberikan analogi seperti lampu merah di persimpangan jalan agar dapat mengkongkritkan teori interseksionalitas:

Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four directions. Discrimination, like traffic through

an intersection, may flow in one direction, and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars traveling from any number of directions and, sometimes, from all of them. Similarly, if a Black woman is harmed because she is in an intersection, her injury could result from sex discrimination or race discrimination...But it is not always easy to reconstruct an accident: sometimes the skid marks and the injuries simply indicate that they occurred simultaneously, frustrating efforts to determine which driver caused them. (Crenshaw 1989).

Dalam contoh di atas, Crénshaw berargumentasi bahwa perempuan kulit hitam didiskriminasi bukan hanya atas dasar rasisme atau seksisme tetapi bisa keduanya. Menurut hemat saya, penindasan yang berlapis inilah yang sering kali luput dan tidak dilihat dalam analisis Pengarusutamaan Gender. Lalu bila demikian halnya, apakah yang harus diperhatikan bila menggunakan analisis interseksionalitas terkait persoalan perempuan dan Covid-19? Tabel 1 berikut ini memperlihatkan beberapa hal yang bisa disorot:

Tabel 1. Dimensi Interseksionalitas Isu Keadilan Gender dalam Pandemi Covid-19

Isu Keadilan gender	Formulasi teori interseksualitas	Permasalahan
Kesehatan dalam kerangka keadilan (<i>Health Equity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pisau analisis yang beragam. Bukan hanya berfokus pada data terpilah gender tetapi menangkap pengalaman-pengalaman perempuan yang majemuk berdasarkan geografi, disabilitas, ras/etnisitas, seksualitas, status sosio-ekonomi, kelas yang berbeda. - Mempersoalkan hegemoni dalam paradigma biomedis yang melihat persoalan gender bukan berdasarkan konstruksi sosial melainkan fakta biologis dan paradigma tersebut sangat dominan membentuk struktur praktik dan penelitian tentang kesehatan. - Perlunya jaringan aktivisme feminis dalam membentuk kebijakan kesehatan perempuan yang berkeadilan dan bukan semata tenaga teknokrat dan birokrat. - Mengurai kekuatan sosial, kultur, ekonomi dan politik yang saling memengaruhi dalam membentuk kebijakan kesehatan perempuan. - Menggunakan kerangka keadilan reproduksi yang mencakup kesehatan dan hak reproduksi. Kerangka keadilan reproduksi menjamin kesejahteraan secara fisik, spiritual, politis, ekonomis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Efek karantina pada perempuan, LGBTQIA dan kelompok marginal lainnya. - Pengaruh Covid-19 pada orang yang berumur dengan menggunakan perspektif gender dan memeriksa persimpangannya secara geografis, pendapatan ekonomi, dan sebagainya. - Akses kesehatan dalam perspektif gender dan persimpangannya. Seberapa banyak perempuan memiliki asuransi kesehatan? - Pelayanan kontrasepsi pada saat karantina dan penggunaan alat kontrasepsi dalam keragaman gender, umur, dan disabilitas. - Kehamilan dan kelahiran di masa pandemi dan perbedaan pelayanan antara keluarga miskin dan kaya. - Hak untuk memilih memiliki anak atau tidak di saat pandemi.
Kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dimensi ras, etnisitas, kelas, minoritas seksual dan gender. - Pengalaman penindasan terhadap perempuan yang majemuk bukan tunggal. - Politisasi kekerasan domestik yang mengesampingkan isu-isu interseksional, misalnya ketidaktersediaan pelayanan pada minoritas seksual atau tidak meratanya pelayanan anti kekerasan seksual di seluruh wilayah negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kekerasan terhadap perempuan tercatat meningkat semasa pandemi terutama pada masa <i>lockdown</i>. - Memonitor peningkatan perkawinan anak dan <i>trafficking</i>. - Memonitor peningkatan kekerasan terhadap LGBTQIA dan mempersoalkan kebijakan-kebijakan berdasarkan binari gender.

Isu Keadilan gender	Formulasi teori interseksualitas	Permasalahan
Kerja dan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedepankan ekonomi berperspektif feminis yang menggarisbawahi ketidakadilan sistem ekonomi yang merugikan perempuan dan kelompok minoritas lainnya. - Fokus pada pembangunan ekonomi “<i>care work</i>”. - Praktik diskriminasi di tempat kerja bukan saja berdasarkan gender melainkan juga berdasarkan umur, LGBTQIA, ras dan etnisitas, agama dan sebagainya. - Membongkar diskriminasi di tempat kerja secara struktural. <i>Hypermasculinity</i>: pengalaman buruk perempuan dalam menghadapi persaingan kerja dengan laki-laki dan <i>selective exit</i>: persaingan dan kondisi yang buruk membuat perempuan mengundurkan diri dari dunia kerja atau menerima pekerjaan yang lebih rendah. <i>Sticky floor practice</i>: perempuan yang bekerja pada level bawah mengalami kesenjangan berpendapatan. <i>Mommy tax</i>: perempuan yang hamil dan membesarkan anak akan mau tidak mau memperlambat laju kariernya. - Persoalan men-genderkan pekerjaan dan mendiskriminasi pekerja <i>Careworkers</i>: pekerja pengasuhan dan perawatan dalam ranah domestik dan publik didominasi oleh perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam berbagai laporan semasa karantina, perempuan bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki karena produktifitas kerja rendah, opsi pekerjaan minimal. Perlu data yang menggambarkan kondisi yang sama di daerah-daerah miskin. - Lebih banyak perempuan yang menanggung beban pekerjaan rumah tangga selama masa karantina. Perlu melihat kondisi di kalangan minoritas seksual dan seluruh kalangan minoritas lainnya. - Data finansial menunjukkan pendapatan buruh migran buruk dalam masa pandemi, apa persoalan yang dihadapi buruh migran selama terisolasi di negara setempat? Pelayanan? Kekerasan? - Mayoritas pekerja esensial (merawat, mengasuh dan yang bekerja di sektor informal adalah perempuan), bagaimana keadaan keamanan mereka dalam bekerja? Apakah perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan mereka? - Pekerja seks semakin termarginalisasi dan dalam keadaan lebih rentan. Bagaimana pekerja seks dari semua identitas gender bertahan dalam masa pandemi?
Pengamanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Matriks dominasi terstruktur di berbagai level. Penindasan dapat terjadi dalam bentuk: (1) Pengalaman pribadi, (2) Level kelompok atau komunitas kultural, identitas gender, ras dan etnisitas (3) Institusi - Opresi yang dilakukan oleh institusi yang menduduki posisi kekuasaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian makanan dan “<i>cash transfer</i>” perlu dicermati dengan perspektif gender dan kelompok minoritas lainnya. Siapakah yang memegang otoritas? Siapakah yang membuat keputusan? - Bagaimanakah sistem suplai makanan dan APD untuk perempuan petani, nelayan, dan pedagang pasar? - Apakah institusi ikut melakukan praktik dominasi di saat pandemi? Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak terfokus pada pandemi demi kepentingan kekuasaan? - Aparat tidak menjalankan fungsi melindungi masyarakat.
Internet dan media digital	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat bias struktur digital yang menguatkan maskulinitas. - Studi feminisme dalam teknologi dan melihat interseksionalitas dalam teknologi. - Memeriksa algoritme seperti Google dalam kontribusinya melakukan penindasan pada kelompok-kelompok minoritas. Misalnya disain yang diskriminatif atau tidak sensitif gender. - Memastikan ruang digital aman untuk perempuan dan kelompok minoritas untuk melakukan pergerakan sosial dan menyuarkan keadilan secara digital. - Memastikan perempuan dan kelompok minoritas lainnya memiliki akses terhadap media sosial besar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pengalaman digital perempuan dan laki-laki berbeda? Termasuk kelompok minoritas lainnya? - Bagaimana akses informasi pada masa pandemi berbeda berdasarkan gender, minoritas seksual, kelas dan umur? - Kontribusi “<i>buzzer</i>” bayaran di internet dalam disinformasi atau melakukan politisasi pandemi demi kepentingan kekuasaan.

Isu Keadilan gender	Formulasi teori interseksualitas	Permasalahan
Kepemimpinan negara	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermasalahkan ketidakmampuan kepemimpinan laki-laki (maskulin). - Demistifikasi mitos bahwa laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan. - Menumbuhkan kepemimpinan perempuan dan kalangan LGBTQIA. - Kebijakan berdasarkan analisis feminisme. - Gaya kepemimpinan perempuan bertumpu pada <i>"coaching"</i> dan bukan <i>"commanding"</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan perempuan (meski hanya ada di 21 negara) menunjukkan lebih mampu menangani Covid-19 seperti misalnya di negara Denmark, Taiwan, Finlandia, Jerman, Islandia, Selandia Baru, lebih berhasil dalam memimpin. - Efektifitas kepemimpinan perempuan di masa pandemi dan menekankan gaya kepemimpinan feminin yang lebih superior dari kepemimpinan maskulin. - Kebijakan-kebijakan Covid-19 yang dihasilkan di negara yang dipimpin oleh perempuan lebih inklusif. Gaya kepemimpinan perempuan lebih menekankan kepedulian (<i>ethics of care</i>).

Sumber: diolah oleh penulis

Hal lain yang perlu dibongkar adalah persoalan maskulinitas yang dihadapi oleh laki-laki di masa pandemi Covid-19. Menurut data yang dihimpun oleh negara-negara maju, lebih banyak laki-laki yang meninggal dunia karena virus Corona ketimbang perempuan. Hal ini bukan disebabkan faktor biologis melainkan faktor sosiologis, gaya hidup yang salah. Laki-laki menurut para ahli lebih banyak yang merokok, konsumsi alkohol berlebihan serta kurang memerhatikan kesehatan. Menurut Tony Porter dalam Schnall (2020), laki-laki di saat krisis malu untuk menunjukkan kelemahannya dan selalu ingin tampil superior serta tidak mau meminta pendapat pasangannya. Laki-laki bukan saja mengalami kesehatan fisik yang buruk namun juga kesehatan mental yang rapuh. Hal ini disebabkan oleh persoalan maskulinitas dan budaya patriarki yang mengokohkan eksistensi laki-laki. Ini adalah salah satu penjelasan mengapa di dalam masa krisis, laki-laki cenderung melakukan kekerasan fisik dan verbal. Hal lain, laki-laki tidak dapat menghadapi tekanan finansial sehingga membuat mereka lebih mudah marah dan agresif. Identitas kesuksesan finansial melekat pada laki-laki, mereka diukur martabatnya melalui "uang". Karena itu, mereka malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, yang dianggap remeh-temeh, dan domain perempuan. Karakteristik *"man box"* ini sangat berbahaya bukan saja bagi diri laki-laki itu sendiri, melainkan juga bagi keluarganya, dan masyarakat yang lebih luas.

Penggunaan lensa interseksionalitas menunjukkan bahwa manusia dibentuk oleh interaksi dari berbagai faktor sosial atau "lokasi" termasuk gender, ras, etnisitas, kelas, umur, seksualitas, geografi, disabilitas/abilitas, status imigrasi dan agama. Sebagai contoh, saat Covid-19 menghantam Amerika Serikat, analisis awal yang dipakai mengabaikan pendekatan interseksionalitas sampai kemudian terbukti Covid-19 di Amerika Serikat

lebih menyerang kelompok miskin dan marginal berkali-kali lipat dibandingkan dengan penduduk kulit putih. Daerah miskin yang berpenduduk padat (akses kesehatan, pendidikan yang tidak memadai) mengalami angka kematian yang signifikan dan jumlah infeksi virus Corona berjumlah besar. Hal ini disebabkan pemerintah abai menggunakan lensa interseksionalitas dan tidak mengaitkan masalah Covid-19 dengan persoalan kesenjangan, diskriminasi, rasisme dan eksploitasi. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis Amerika Serikat terbukti gagal.

Demikian pula di Indonesia, sistem ekonomi yang berpusat pada pro-bisnis (terbukti dari pengesahan Omnibus Law) baru-baru ini, mengabaikan perlindungan terhadap pekerja. Sistem pro-bisnis membawa lebih banyak penderitaan di kalangan masyarakat umum dan mementingkan kalangan elite. Terbukti di masa pandemi, perempuan yang mayoritas bekerja di bidang *care work*, mengalami krisis besar. Ini disebabkan karena pemerintah terlalu lama memarginalkan perempuan dan mengacuhkannya pada sektor ekonomi. Di masa pandemi Covid-19, dunia bergantung pada *careworkers* dan *caregivers* yang mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan. Di bidang *careworkers*, mayoritas perempuan yang berprofesi di bidang keperawatan, berada di garda depan menghadapi pandemi Covid-19 di rumah sakit.

Perempuan paling banyak menjadi pekerja esensial, bekerja di pasar, pengasuh anak dan usaha kecil seperti makanan. Perempuan dominan di pekerjaan *caregivers*, mereka menanggung beban rumah tangga, memasak, mengasuh anak, melayani suami, menjaga orang tua yang sakit, dan sebagainya. *Careworkers* dan *caregivers* tidak memiliki kemewahan berdiam di rumah seperti para CEO, pengacara, direktur, dan sebagainya, yang rata-rata

memiliki *caregivers* bahkan *careworkers* di rumah. Mereka yang tergolong kelas atas diuntungkan oleh sistem ekonomi yang berorientasi profit dan bukan berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin terlihat dengan gamblang dalam masa krisis saat ini. Mereka yang kaya, memiliki jabatan (atau bekerja di tempat mapan) mendapatkan pelayanan pemeriksaan Covid-19 dengan cepat dan terjamin. Sedangkan mereka yang tergolong dalam *careworkers* dan *caregivers* tidak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan fasilitas testing Covid-19, mudah terkena pandemi informasi (disinformasi), dan tidak memiliki akses internet yang memadai untuk tetap mengikuti pendidikan yang sebagian besar dijalankan secara daring.

Praksis

Interseksionalitas digunakan dalam bentuk praksis kritis (*critical praxis*) dalam arti menunjukkan bagaimana manusia hidup sebagai individu atau bagian dari suatu kelompok dalam keseharian hidupnya (Hill Collins & Bilge 2020). Maksudnya, pendekatan interseksional berangkat dari pengalaman masyarakat yang majemuk dan berupaya untuk membongkar dan mengkritik serta menolak dominasi struktur yang berdasarkan relasi kuasa. Namun, pembedahan relasi kuasa di dalam masyarakat dilihat dalam rangka untuk perubahan sosial (bukan hanya topik yang didiskusikan di ruang kelas). Dengan demikian, pendekatan interseksionalitas memaksa akademisi untuk turut berpartisipasi pada gerakan sosial menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat kecil. Pendekatan interseksionalitas tidak mendikotomikan “pekerjaan intelektual/akademisi” dan “aktivisme” tetapi menggabungkannya dan menuntut bahwa keduanya diterapkan di semua bidang termasuk dalam menjalankan pemerintahan. Berpikir kritis bukan hanya domain di kampus tetapi juga dapat diterapkan di “jalanan”. Menggabungkan interseksi intelektual/akademisi dan aktivisme membawa sinergi dan memproduksi pengetahuan baru atau praktik yang lebih komprehensif.

Interseksionalitas menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam berbagai macam fenomena sosial. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan individu atau institusi bukan hanya domain kampus tetapi domain ruang komunitas yang peduli pada perubahan. Kampus pun tidak dapat membatasi aktivitasnya hanya pada “ruang berpikir” tetapi juga “ruang aksi” yang perlu diterapkan dalam setiap pergerakan sosial. Aktivisme mahasiswa yang ditunjukkan dalam pergerakan “Black

Lives Matter” di Amerika Serikat maupun penolakan “Omnibus Law” misalnya merupakan contoh pendekatan interseksionalitas yang praksis. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa dalam protes “Omnibus Law” tidak terpisahkan atau berkelindan dengan gender dan kelas.

Seorang sosiolog, Bonnie Thornton Dill (2001), melakukan penelitian tentang awalnya konsep interseksionalitas mengemuka di universitas-universitas Amerika Serikat. Ia mewawancarai 70 orang dosen dari 17 fakultas yang bertanggung jawab atas teori ini dan menemukan bahwa pemikiran mereka menjauhi dikotomi akademik dan aktivisme.

What I take from these interviews is that work “at the intersections” is an analytical strategy, an approach to understanding human life and behavior rooted in the experiences and struggles of disenfranchise people. It is also an important tool linking theory with practice that can aid in the empowerment of communities and individuals (Hill Collins & Bilge 2020).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa baik para akademisi dan peneliti maupun aktivis menggunakan pendekatan interseksionalitas untuk tujuan perubahan sosial dengan menekankan interkoneksi antara teori dan praktik. Bagi saya jelas, bahwa pendekatan interseksionalitas memaksa kita untuk melakukan aktivisme di berbagai bidang agar ada perubahan sosial yang mendasar. Kampus, pemerintah, organisasi maupun institusi yang menolak *critical praxis* tidak akan membawa perubahan yang signifikan dan cenderung untuk berada di status quo yang menindas masyarakat bawah.

Penutup: Agenda Feminis

Pandemi Covid-19 menunjukkan sistem ekonomi dan sosial kita sangat rapuh. Terbukti setiap kali ada krisis, negara tidak mampu untuk menjamin keamanan masyarakat, kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam keadaan yang chaos, perempuan dan anak perempuan masuk di dalam kelompok rentan bersama dengan kelompok-kelompok marginal lainnya termasuk kelompok LGBTQIA. Oleh sebab itu, penanganan krisis tidak bisa hanya bersifat reaktif (karena ini hanya menempelkan “band aid” sementara), tetapi sangat perlu dan urgen melakukan perubahan secara total. Beberapa agenda yang bisa diperjuangkan:

Pertama, kekuatan Feminis (Feminist power). Pemimpin perempuan terbukti lebih handal menangani krisis. Kepemimpinan mereka mengedepankan etika

kepedulian. Contohnya, Jacinda Ardern dari Selandia Baru, Erna Solberg dari Norway, Katrin Jakobsdottir dari Islandia, Angela Merkel dari Jerman, Tsai Ing-wen dari Taiwan, Sliveria Jacobs dari Sint Maarten. Mereka menggunakan pendekatan kepemimpinan yang otentik, transparan pada masyarakat (termasuk data Covid-19) dan bertindak konkret. Pemimpin perempuan paham pendekatan interseksionalitas dan telah memasukkan pendekatan interseksionalitas di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Mereka telah merevisi total sistem ekonomi yang terpusat pada pemilik modal dan ganti fokus pada *careworkers* dan *caregivers* yang merupakan kelompok andalan penangkal krisis ekonomi.

Kedua, kebijakan makro ekonomi yang menitikberatkan pada kerja perawatan (*care*). Perlu menteri yang membuat kebijakan yang mengaitkan gender dan ekonomi, serta menggunakan lensa interseksionalitas.

Ketiga, kebijakan yang mengandalkan perspektif feminis. Menteri Audun Lysbakken (Menteri berjenis kelamin laki-laki yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak di Norwegia), menggarisbawahi pentingnya kebijakan pro-gender karena terkait dengan kepentingan laki-laki. Perlu melakukan investasi pada perempuan yang merupakan populasi terbesar (51%), sehingga menghasilkan ekonomi yang produktif.

Keempat, sistem pendidikan berbasis keadilan gender dan diversitas gender. Di dalam situasi pandemi Covid-19, hampir seluruh pengajaran dialihkan secara daring. Pekerja di bidang pendidikan dasar adalah mayoritas perempuan. Lensa interseksionalitas menangkap kesenjangan pendidikan yang menghantam kelas masyarakat bawah di masa krisis.

Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi perlunya penggantian sistem ekonomi secara total. Pandemi Covid-19, memaksa kita untuk melakukan evaluasi total sistem ekonomi, sosial dan kultural yang ada. Perubahan di bidang ekonomi perlu dilakukan segera. Salah satu yang mendasar adalah perlunya lensa ekonomi feminis yang memasukkan kerja tanpa upah (kerja domestik) dan non-market sebagai bagian dari diskursus ekonomi. Selama ini kerja domestik termasuk kerja pengasuhan merupakan isu sosial dan bukan isu ekonomi. Ekonomi feminis juga menyoroti faktor budaya patriarki yang mengakibatkan ketimpangan distribusi properti, pendapatan, pengetahuan serta tubuh. Tetapi saya juga berpendapat bahwa analisis ketimpangan distribusi ala John Rawls tidak memadai. Saya lebih memilih analisis Iris Marion Young (1990)

yang menitikberatkan analisis penindasan dan bukan ketimpangan distribusi. Young menggarisbawahi adanya lima wajah penindasan, yakni, kekerasan, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan dan imperialisme. Menurutnya, kelima wajah penindasan ini bukan saja memperlihatkan adanya penindasan secara struktural tetapi juga berfokus pada persoalan kelompok marginal. Disinilah, sistem ekonomi yang ada tidak dapat menerjemahkan secara jernih kebutuhan kelompok marginal karena tidak memasukkannya di dalam kerangka ekonomi. Saatnya persoalan ekonomi dan sosial tidak dipisahkan tetapi dianggap sebagai interseksi dan interkoneksi yang mampu menjawab persoalan keadilan.

Daftar Pustaka

- Caspani, M 2015, *Violence Against Women Rises in Ebola Hit Nations: Ministers*, diakses 1 Oktober 2020, <https://www.reuters.com/article/us-health-ebola-women/violence-against-women-rises-in-ebola-hit-nations-ministers-idUSKBNOME30520150318>
- Crenshaw, K 1989, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics," *University of Chicago Legal Forum*, Vol. 1989: Iss. 1, Article 8, diakses 1 Oktober 2020, <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/>
- Hesse-Biber, SN 2012, *Feminist Research, Theory and Praxis*, London: Sage.
- Hill Collins, P & Bilge, S 2020, *Intersectionality*, 2nd Edition. Cambridge: Politiy Press.
- Htun, M & Weldon, L 2012, "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005," *American Review*, 106 (3), 548-569.
- Oktavianti, TI 2020, *Jakarta Records Spike in Domestic Violence Reports During Work from Home Period*, diakses 1 Oktober 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/07/jakarta-records-spike-in-domestic-violence-reports-during-work-from-home-period.html>
- de Paz, C, Miriam, M, Munoz Boudet, AM & Gaddis, I 2020, *Gender Dimensions of the Covid-19 Pandemic*, World Bank, Washington, DC. © World Bank, diakses di <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33622> License: CC BY 3.0 IGO.
- Peterson, J & Lewis, M 2001, *The Elgar Companion to Feminist Economics* (2001). Edward Elgar Publishing.
- Pittman, A 2014, *Fast Forward Gender Equality and Women's Empowerment. Reflections on Measuring Change for UNDP's Thematic Evaluation on Gender Mainstreaming and Gender Equality 2008-2013*, United Nations Development Programme: New York.
- Schnall, M 2020, *Putting a Gender Lens on Covid-19: Thought Leaders Weigh In*, diakses 1 Oktober 2020, <https://whatwillittake.com/interviews/putting-a-gender-lens-on-covid-19-thought-leaders-weigh-in/>

Taylor, V et al. 2020, *Feminist Frontiers*, 10th Edition, Maryland: Rowman and Littlefield.

United Nations Publications 1997 *Report of the Fourth World Conference of Women, Beijing, 4-15 September 1995*. No. E96.IV.13, United Nations publication: New York.

Wade, L & Ferree, MM 2019, *Gender, Ideas, Interactions, Institutions*, New York-London : WW Norton.

WHO 2007, *Addressing Sex and Gender in Epidemic Prone Infectious Diseases*, WHO Press: Switzerland.

Young, IM 2000, *Inclusion and Democracy*, Oxford University Press.

Young, IM 1990, *Justice and The Politics of Difference*, Princeton University Press.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatulah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Elizabet Repelita Kuswijayanti, M.Si (Indonesia)
5. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
6. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
7. Mariana Amiruddin

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marginal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075

Canada

